

Konflik Palestina-Israel Pada Masa Intifada II dalam Perspektif Konstruktivisme dan Strategi Politik

Amalia Tri Puspita Sari

Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
e-mail : amaliatri53@gmail.com

Abstract

The Palestinian-Israeli conflict has occurred since 1948 and continues to persist; until now, it has not ended. There were times when the conflict escalated, including in the period 2000-2005 known as the Intifada II. That period became a historic event in the 21st century, especially in the Middle East. Before the Second Intifada, there was the First Intifada (1987-1993) which became a symbol of the first physically planned resistance carried out by the Palestinian people after many attempts to resolve the conflict diplomatically. After the First Intifada, efforts were made to resolve the dispute through the Oslo Agreement. Still, Israel did not fulfill some of the promises made to the Palestinians, and the continued occupation and repression of the Palestinian people had triggered a more significant conflict until the Second Intifada (2000-2005) erupted. This article aims to map the variables involved in this conflict so that it is known which variables play a role in escalating and prolonging the conflict. The relationship between these variables is constructed based on systems thinking and visualized in a Causal Loop Diagram. Furthermore, the authors analyze this phenomenon with the perspective of constructivism and the concept of political strategy in conflict resolution. The finding of this study is that external actor, namely the United States, has taken the form of a Gradualism strategy through conflict manipulation so that the conflict becomes prolonged.

Keywords: *conflict resolution, diplomacy, Palestine-Israel, political strategy, systems thinking*

Abstrak

Konflik Palestina-Israel telah terjadi sejak tahun 1948 dan terus berkepanjangan, sampai saat ini belum usai. Ada masa-masa ketika konflik tereskalasi, antara lain pada periode tahun 2000-2005 yang dikenal dengan nama Intifada II.

Periode itu menjadi peristiwa bersejarah di abad 21 khususnya di wilayah Timur Tengah. Sebelum terjadinya Intifada II, telah terjadi Intifada I (1987-1993) yang menjadi simbol perlawanan terencana secara fisik yang pertama dilakukan oleh rakyat Palestina setelah banyak kali dilakukan upaya penyelesaian konflik secara diplomasi. Pasca Intifada I, dilakukan upaya penyelesaian konflik melalui Perjanjian Oslo namun tidak terealisasinya isi perjanjian dan berlanjutnya pendudukan dan represi terhadap bangsa Palestina telah memicu konflik yang lebih besar hingga meletuslah Intifada II (2000-2005). Tujuan artikel ini adalah untuk memetakan variabel-variabel yang terlibat dalam konflik ini sehingga diketahui variabel mana saja yang berperan dalam mengeskalasi dan memperpanjang konflik. Hubungan antarvariabel itu dikonstruksi dengan berbasis *systems thinking* dan divisualisasikan dalam sebuah Causal Loop Diagram. Selanjutnya penulis menganalisis fenomena ini dengan konsep konstruktivisme dan konsep strategi politik dalam resolusi konflik. Temuan penelitian ini adalah bahwa aktor eksternal, yaitu Amerika Serikat telah melakukan bentuk strategi Gradualisme lewat manipulasi konflik sehingga konflik menjadi berkepanjangan.

Kata kunci: diplomasi, Palestina-Israel, resolusi konflik, strategi politik, *systems thinking*

Pendahuluan

Konflik Palestina-Israel dimulai sejak tahun 1948, yaitu ketika negara Israel mendeklarasikan pada 14 Mei 1948. Namun demikian, akar dari kemunculan konflik ini sudah terjadi sejak era Perang Dunia I. Saat itu, tanah Palestina merupakan bagian dari Kekaisaran Turki Ustmani, dan Turki Utsmani memutuskan untuk bergabung dengan Blok Sentral, sehingga ia menjadi musuh dari Sekutu. Sementara di wilayah Eropa, paham Zionisme mulai menyebar. Paham ini awalnya dikemukakan oleh seorang jurnalis asal Austria bernama Theodore Herzl yang meliput kehidupan bangsa Yahudi di Perancis yang dipersekusi dan dialienasi dan ia mengemukakan pentingnya bangsa Yahudi memiliki negara sendiri (Ben-Gurion, 1998). Kehadiran Theodore Herzl menjadi titik awal munculnya ideologi Zionisme yakni ideologi yang menuntut atas pendirian negara bangsa di tanah yang telah dijanjikan tidak lain tanah orang-orang Palestina. Konflik antara Palestina dan Zionis Israel berlanjut hingga memasuki abad 21. Perlawanan masyarakat Palestina terhadap Zionis Israel tetap dilakukan lantaran okupasi wilayah Palestina dilakukan dengan cara yang ilegal. Awalnya, komunitas Yahudi membeli tanah bangsa Arab Palestina dan membangun permukiman Yahudi. Kemudian, setelah Resolusi PBB 181 tahun 1947 ditetapkan PBB untuk membagi dua wilayah Palestina,

orang-orang Yahudi melakukan pengusiran kepada warga Palestina yang berada di wilayah yang ditetapkan oleh PBB sebagai negara Israel. Mereka juga melakukan teror kepada masyarakat Palestina untuk segera meninggalkan tempat tinggal mereka. Teror tersebut salah satunya dilakukan oleh kelompok militan bersenjata Zionis yakni Haganah bentukan seorang ekstrimis Yahudi bernama Vladimir Zhabotinsky.

Sejak awal dimulainya persiapan negara Israel, yaitu di masa mandat Inggris 1920 hingga 1948 di mana Inggris memfasilitasi migrasi orang-orang Yahudi dari Eropa ke Palestina, warga Arab Palestina telah menunjukkan protes dan perlawanannya. Bahkan, pada tahun 1936-1939 orang Palestina melakukan perlawanan bersenjata yang disebut Pemberontakan Besar Palestina (Thawrat Filastin al-Kubra) yang menuntut kemerdekaan dari Inggris dan penolakan atas masifnya kedatangan orang-orang Yahudi ke tanah air mereka. Israel dideklarasikan tahun 1948, bangsa Palestina terus melakukan perlawanan, antara lain dilakukan oleh PLO (Palestine Liberal Organization) yang didirikan tahun 1964, serta beberapa milisi bersenjata lainnya, seperti Jihad Islam (Harakat al-Jihād al-Islami fi Filastin) yang didirikan tahun 1970-an dan Hamas (Harakat al-Muqawamah al-Islamiyah) yang didirikan tahun 1987.

Perlawanan para pejuang Palestina pada periode 1987-1993 disebut sebagai Intifada Pertama (Intifada I). Konflik yang sangat tereskalasi ini diakhiri dengan upaya perdamaian dengan mediasi AS, antara PLO yang saat itu dipimpin Yaser Arafat dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin pada tanggal 13 September 1993. Perjanjian itu dikenal dengan nama Oslo Accords (Kesepakatan Oslo) dan berisi tentang kewenangan untuk mengatur pembagian kewenangan sementara di antara kedua pihak. Dengan penandatanganan Kesepakatan Oslo, Israel menerima PLO sebagai perwakilan dari masyarakat Palestina dan menyetujui dibentuknya Otoritas Palestina dengan Yaser Arafat (PLO) sebagai pemimpinnya. Sebaliknya, Otoritas Palestina bersedia mengakui Israel dan berjanji untuk menghentikan serangan kepada masyarakat Israel.

Salah satu butir perjanjian dalam Oslo Accords, yaitu pasal 19, disebutkan bahwa kedua pihak harus menghormati hak asasi manusia dan aturan hukum. Di tahap ini, PLO bertransformasi dari milisi bersenjata menjadi organisasi yang lebih moderat dengan menerima proses diplomasi dan perjanjian dengan Israel. Namun, meskipun ada janji mengenai perlindungan HAM, klausul-klausul lain dalam Oslo Accords bertentangan dengan janji tersebut, sehingga memunculkan penderitaan bagi bangsa Palestina. Antara lain, seperti dilaporkan organisasi HAM Israel, B'Tselem, Kesepakatan Oslo menetapkan kontrol Israel atas wilayah-wilayah yang menghubungkan antara wilayah yang dikontrol Otoritas Palestina. Akibatnya, warga Palestina menjadi terhalang untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Kontrol Israel atas penyeberangan perbatasan merugikan aspek ekonomi Palestina, menghalangi hak-hak warga Palestina

untuk bekerja dan bersekolah, menghalangi hubungan antarkeluarga. Selain itu, Israel melakukan berbagai kekerasan, hingga pembunuhan, di kawasan pendudukan (occupied territory). Hal ini memunculkan aksi perlawanan, antara lain aksi-aksi bom yang dilakukan Hamas terhadap Israel. Menurut data dari B'Tselem, selama periode 1993-1999, ada 364 warga Palestina yang dibunuh tentara Israel, dan sebaliknya ada 258 orang Israel yang dibunuh milisi Palestina (B'Tselem, 1999).

Tensi di kawasan semakin memanas ketika pada tanggal 28 September 2000, PM Israel Ariel Sharon melakukan kunjungan yang sangat provokatif di Temple Mount, atau yang disebut oleh kaum Muslim sebagai Haram al-Sharif, yaitu kawasan dimana kompleks Masjid al-Aqsha berada. Masuknya Ariel Sharon, didampingi oleh pasukan bersenjata dan petinggi Partai Likud Israel, ke kawasan Al Aqsha menimbulkan kemarahan masyarakat Palestina. Mereka melakukan aksi demo memprotes kedatangan Sharon dan dihadapi dengan represif oleh militer Israel sehingga muncul aksi-aksi kekerasan yang menjatuhkan korban sangat banyak, baik di pihak Palestina maupun Israel. Perlawanan orang Palestina di masa ini disebut sebagai Intifada II dan karena terjadi di kompleks masjid Al Aqsa, disebut juga "Intifadhah al-Aqsha" yang berlangsung dari 2000 hingga 2007. Jumlah korban tewas dalam periode 7 tahun ini adalah 4.219 orang dari Palestina dan 1.024 orang Israel (Anwar, 2021).

Dalam artikel ini penulis akan mengimplementasikan cara berpikir sistem (*systems thinking*) dalam memetakan krisis yang terjadi pada masa intifada. Artikel dan riset terdahulu mengenai konflik Palestina sudah banyak ditulis oleh para penstudi HI, namun demikian masih belum ditemukan analisis yang memanfaatkan *systems thinking*. Dengan *systems thinking*, penulis berupaya mengidentifikasi faktor sebab-akibat yang menyebabkan konflik Palestina-Israel menjadi konflik yang berkepanjangan. Pisau analisis yang digunakan dalam riset ini adalah konstruktivisme dan konsep strategi politik dalam resolusi konflik.

Systems Thinking (Berpikir Sistem)

Dalam riset ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengumpulkan data-data dari dokumen resmi, buku, jurnal, berita, dan video dokumenter. Selanjutnya, penulis menggunakan berpikir sistem (*systems thinking*), penulis dapat menemukan variabel-variabel yang saling berhubungan sebab-akibat. Berpikir sistem merupakan proses berpikir yang berusaha untuk menemukan logika organisasi dan disiplin integrasi agar dapat mengetahui pola-pola dan hubungan melalui masalah yang lebih kompleks. Para ahli yang menggunakan berpikir sistem menemukan bahwa prinsip yang dibawa oleh berpikir sistem ini adalah bersifat non-linear. Sistem merupakan gabungan elemen yang saling berkaitan dan terorganisir untuk

menggerakkan siklus tertentu seperti yang ditulis Meadows (2008:11) *“A system isn’t just any old collection of things. A system is an interconnected set of elements that are coherently organized in a way that achieve something. If you look at the definition closely for a minute, you can see that a system must consist of the kinds of things: elements, interconnections, and a function of purpose”*(Sarasi, et al., 2021).

Dengan kata lain, berpikir sistem adalah cara berpikir bahwa satu kejadian akan menyebabkan kejadian yang lain sehingga dampak dari kejadian tersebut akan berimbas kepada sumber kejadian awal, seperti efek domino. Konsep berpikir sistem ini akan memudahkan kita untuk menemukan masalah ataupun hambatan fenomena sosial baik sederhana maupun kompleks sehingga membantu kita menemukan solusi yang dapat memperbaiki sistem dan diharapkan dapat berkesinambungan atau *sustainable*. Output dari berpikir sistem adalah visualisasi sistem yang kompleks yang terdiri dari elemen atau variabel, interkoneksi, dan fungsi di dalamnya dalam bentuk *causal loop diagram* (CLD).

Perspektif Konstruktivisme dan Strategi Politik dalam Resolusi Konflik Palestina-Israel Pada Masa Intifada II

Perspektif Konstruktivisme dalam studi Hubungan Internasional adalah respon dari perspektif terdahulu yang lebih mapan, yakni Liberalisme dan Realisme. Pada masa berkembangnya Perspektif Konstruktivisme, dunia sedang berada dalam dua polar ideologi antara dua negara adidaya, yakni Amerika Serikat dan Rusia. Peristiwa tersebut biasa kita kenal yakni Perang Dingin. Amerika Serikat sebagai polar ideologi Liberalisme dan Rusia sebagai polar ideologi Realisme yang saling berebut pengaruh di panggung internasional. Hegemoni ideologi mereka semakin tak terbendung hingga muncul paham Neoliberalisme dan Neorealisme. Kedua paham tersebut sama-sama berakar dari pemikiran Liberalisme dan Realisme. Para pemikir konstruktivis skeptikal terhadap dua ideologi tersebut karena mereka percaya bahwa semua fenomena yang terjadi di dunia ini merupakan hasil konstruksi atau buatan manusia. Atau bisa dikatakan bahwa peristiwa yang terjadi dalam panggung internasional tidak lepas dari intensi yang subjektif para pelaku kejadian, yakni manusia. Maka dari itu, determinan utama dalam perspektif Konstruktivisme adalah *individual actor*. Instrumen yang dipakai oleh perspektif Konstruktivisme adalah ide, wacana, dan sikap dari aktor individu tersebut. Dalam ranah hubungan internasional, aktor individu dalam perspektif Konstruktivisme adalah pemimpin negara atau presiden. Atas dasar ini, penulis akan menganalisis tokoh-tokoh representasi Palestina maupun Israel pada Intifada II.

Selanjutnya, penulis akan menggunakan konsep strategi politik. Dalam hubungan internasional, strategi politik yang diterapkan pada saat bernegosiasi

terhadap penyelesaian suatu konflik menjadi salah satu kunci utama untuk mendapatkan target atau tujuan. Strategi politik yang digunakan dalam artikel ini untuk menganalisis konflik berkepanjangan Palestina-Israel pada masa Intifada II yakni *Sequencing Strategies and Tactics*. Konsep ini membahas bagaimana *bargaining* atau bernegosiasi juga memiliki strategi. Strategi bernegosiasi dapat dilakukan jika negara memiliki *power* atau kekuatan besar dalam politik global. Negosiasi yang didukung dengan *power* dapat memunculkan aspek-aspek yakni *memanipulasi situasi dengan menggunakan kekuatan*. Sehingga jika suatu negara memiliki kekuatan politik yang tinggi dapat dengan mudah memanipulasi keadaan dalam suatu agenda bernegosiasi. *Model Sequencing* atau pengurutan dalam teori ini juga memunculkan beberapa jenis strategi negosiasi, salah satunya adalah *Gradualism Approach (Incrementalism atau Negotiation Strategies)*. Dalam strategi ini mediator akan menggiring negosiasi dari yang awalnya merupakan permintaan sederhana menjadi negosiasi yang kompleks sehingga dibutuhkan tawar-menawar yang berkelanjutan. Mediator dalam negosiasi memiliki intensi untuk memecah konflik menjadi semakin kompleks bahkan berujung kepada konflik yang tidak dapat diselesaikan (*sustain*) (Weiss, 2003).

Perspektif Konstruktivisme terhadap Aktor Individual Palestina-Israel

Konflik Palestina-Israel di masa Intifada II menjadi tanda bahwa resolusi konflik yang diupayakan bersama negara-negara terlibat adalah sebuah kegagalan. Dalam perspektif Konstruktivisme, kegagalan tersebut juga merupakan konstruksi sosial yang sangat bergantung kepada aktor individu sebagai determinan utama perspektif ini. Sesuai isi perjanjian Oslo I dan II, Otoritas Palestina difasilitasi untuk mendirikan pasukan bersenjata (polisi) dengan tugas menjaga keamanan dan mencegah warga Palestina melakukan kekerasan terhadap Israel. Selain itu, isi perjanjian tersebut terkait dengan pembagian kontrol keamanan atas Tepi Barat, pelaksanaan pemilu Palestina, pengembalian wilayah-wilayah Palestina yang diduduki Israel (*transfer of land*), aturan perdagangan di antara kedua pihak dan pembebasan tahanan Palestina (Sharif, 2009:226).

Di satu sisi, Israel tidak melaksanakan hampir semua janjinya. Banyak peneliti politik menilai bahwa Israel tidak menjalankan Perjanjian Oslo dan justru melakukan banyak okupasi di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Menurut Amnesty International dalam data resolusi PBB, Israel banyak melakukan *illegal settlement* terhitung setidaknya 600.000 penduduk ilegal, terutama di Tepi Barat dan Yerusalem Timur terhitung hingga tahun 2005 (berakhirnya Intifada II) sebanyak 9.000 penduduk ilegal Israel tinggal di Gaza.

Tidak dilaksanakannya isi Perjanjian Oslo oleh Israel sangat terkait dengan keputusan-keputusan politik para pemimpinnya. Penanda tangan Oslo, PM Yitzhak Rabin, dibunuh oleh Zionis dari kelompok sayap radikal kiri (*radical left-wing*) pada 4

November 1995. Setelah itu, PM Israel silih berganti dijabat oleh Shimon Peres, kemudian digantikan oleh Netanyahu yang melakukan kebijakan tangan besi. Tahun 1999, Ehud Barak menang pemilu mengalahkan Netanyahu. Kekerasan semakin meningkat sehingga Presiden AS saat itu, Bill Clinton dan President Mesir Hosni Mubarak, mengadakan perundingan damai di Sharm Al-Sheikh Mesir pada 4 October 1999. Tidak ada keputusan penting yang diambil oleh PM Ehud Barak and Arafat selain bahwa mereka setuju untuk mencari solusi. Perundingan yang dimediasi Clinton kembali dilakukan pada Juli tahun 2000, di Camp David, namun kembali tidak ada kesepakatan yang berhasil diambil karena Israel menolak kembali pada komitmen Oslo (Sharif, 2009: 232).

Pada 28 September 2000, Ariel Sharon (saat itu posisinya adalah pemimpin partai oposisi Israel, Likud) bersama dengan delegasi Partai Likud, dikawal oleh ratusan polisi antiterror, masuk ke Temple Mount, atau kawasan Masjid Al-Aqsa Mosque di waktu sholat dan hal ini merupakan pelanggaran serius dari aturan mengenai kunjungan ke situs tersebut sehingga memunculkan protes dan berlanjut pada aksi-aksi kekerasan antara pasukan Israel yang bersenjata lengkap dengan jamaah masjid Al-Aqsa pada saat itu. Aksi-aksi demonstrasi juga meluas di seluruh kawasan Tepi Barat dan Jalur Gaza, yang direspon dengan peluru tajam dan peluru karet, serta gas air mata, oleh tentara Israel (Sharif, 2009: 226). Warga Palestina terus melakukan perlawanan yang disebut sebagai Intifada II yang berlangsung hingga tahun 2005. Pada Maret 2001, Ariel Sharon terpilih sebagai PM Israel, mengalahkan Ehud Barak dalam pemilu.

Di sisi lain, Otoritas Palestina ditekan untuk menghalangi adanya perlawanan. Karena warga Palestina yang terus mengalami kekerasan, penghancuran rumah-rumah, serta pembunuhan dari pihak Israel, aksi-aksi perlawanan terjadi. Perlawanan ini dipimpin oleh milisi Palestina, seperti Hamas dan Jihad Islam. "Kegagalan" Otoritas Palestina menghalangi aksi-aksi perlawanan ini membuat Arafat dituduh tidak memiliki otoritas, bahkan dituduh mendukung "terorisme." Namun di sisi lain, dapat dipahami bahwa bagi Arafat, cita-cita kemerdekaan Palestina tidak dapat ditawar. Meskipun Arafat memilih untuk berdiplomasi, dia tetap memegang cita-cita Palestina merdeka. Antara lain pernyataannya, "Tidak semua yang mereka inginkan akan terjadi. Kami akan mendirikan kami negara merdeka" (Sharif, 2009: 226).

Aksi-aksi perlawanan warga Palestina dijadikan alasan oleh Israel untuk menuduh Arafat mendukung "terorisme." Alasan teorisme ini, dipakai oleh PM Israel Sharon pada Desember 2001 untuk mengebom rumah Arafat dan beberapa kantor Otoritas Palestina. Saat itu Ariel Sharon mengatakan, "Saya mengatakan kepada semua orang yang mendengar saya di seluruh dunia: mereka yang bangkit melawan kita untuk membunuh kita bertanggung jawab atas kehancuran mereka sendiri seperti yang telah dilakukan di dunia di bawah kepemimpinan berani Presiden Bush." Sharon merujuk

kepada Bush, karena pada masa itu, pasca 911 (11 September 2001), Bush melancarkan Perang Melawan Terorisme (Goldenberg, 2001).

Berlanjutnya konflik Palestina-Israel tidak bisa dilepaskan oleh campur tangan Amerika Serikat. Mengingat bahwa semua yang terjadi adalah konstruksi sosial, kehadiran Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik kedua negara tersebut menjadi *obvious*. Konflik antar dua negara tersebut sudah dikonstruksi semenjak Amerika Serikat bersedia menjadi penengah. Meskipun Israel melakukan sangat banyak pelanggaran atas isi perjanjian Oslo, namun AS tetap melanjutkan dukungannya kepada Israel, antara lain dengan terus menyuplai dana hibah sebesar 3 M USD per tahun. Dalam serangan PM Ariel Sharon ke rumah Arafat pun, AS tidak memberikan kecaman, meskipun pesawat yang digunakan adalah F-16 buatan AS. Juru bicara Gedung Putih pada masa itu, Ari Fleischer, berkomentar, "Sudut pandang presiden adalah Israel adalah kekuatan berdaulat. Israel memiliki hak untuk membela diri." "Presiden berpikir sangat penting bahwa penjara Palestina tidak hanya memiliki jeruji di bagian depan, tetapi tidak lagi memiliki pintu putar di bagian belakang," kata Fleischer (Goldenberg, 2001).

Uraian di atas, dalam pandangan penulis, merupakan bukti bahwa determinan utama dalam perspektif Konstruktivisme yakni individu yang memiliki kekuasaan dan berpotensi mengonstruksi suatu peristiwa jelas terlihat dalam konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel.

Tindakan Strategi Politik (*Gradualism Approach*) terhadap Aktor Terlibat dalam Resolusi Konflik Palestina-Israel

Amerika Serikat adalah aktor negara yang sangat berperan dalam berbagai upaya negosiasi antara Palestina dan Israel. Menurut penulis strategi penyelesaian yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap konflik Palestina-Israel merupakan penerapan konsep *Sequencing Strategies* dengan model pendekatan Gradualisme. Pendekatan Gradualisme ini dilakukan oleh diplomat Amerika Serikat Henry Kissinger. Kissinger pada saat itu sangat mendominasi kebijakan luar negeri AS dan aktif dalam mengawal konflik tersebut. Yang dilakukan Kissinger adalah memanipulasi situasi politik dalam bentuk campur tangan serta menjadi penengah pada Oslo Accords I dan II. AS memanipulasi *trust issue* yang dirasakan oleh masing-masing pihak Palestina dan Israel. Kepercayaan keduanya yang bisa dinilai 'rendah' menjadi celah untuk membuat suasana ketegangan kedua negara "ditenangkan" dengan mengakui kedaulatan satu sama lain. Tujuannya untuk memperjelas dan memecah belah keduanya sehingga di balik pengakuan kedaulatan yang dilakukan, semakin memperuncing konflik tersebut. Tujuan lain dari pendekatan Gradualisme ini adalah membangun kepercayaan dan ketergantungan kepada AS sebagai penengah di dalam konflik tersebut sehingga peran Amerika Serikat

terhadap konflik ini sangat besar. Ketika waktu berlakunya perjanjian telah usai, sudah dapat dipastikan kedua negara akan berkonflik dan berujung pada perang.

Jika ditinjau ulang, masyarakat Arab-Palestina dan Yahudi-Israel sebenarnya mungkin untuk hidup berdampingan, akan tetapi ideologi Zionisme yang radikal dan dukungan AS kepada rezim Zionis dalam bentuk suplai persenjataan, politik, dan dana menjadi penghalang besar dalam mencapai terealisasinya *two state-solution*.

Pasca Oslo, AS memediasi kedua pihak dengan mengadakan Camp David Summit pada bulan Juli tahun 2000, tepat dua bulan sebelum terjadinya Intifada II. Perundingan ini dihadiri oleh Ehud Barak sebagai Perdana Menteri Israel saat itu dan Presiden Otoritas Palestina, Yasser Arafat, sementara Presiden AS, Bill Clinton, menjadi mediatornya. Dalam Camp David ini, AS juga melakukan Gradualisme. Hal ini terlihat dari sikap negosiator AS yang menyudutkan Arafat, memandangnya sebagai pihak yang mempersulit perundingan. Fakta ini ditemukan oleh Pressman (2003) dalam penelitiannya. Menurutnya, para perunding Israel dan AS mengklaim bahwa Arafat dan anggota timnya di Camp David tidak mau memainkan peran konstruktif dan tidak mau berkompromi. membangun posisi. Pressman mengutip negosiator AS, Dennis Ross yang menyebut bahwa Arafat selama 14 hari di Camp David “selalu mengatakan tidak pada apapun.”

Namun, penelitian Pressman menemukan bahwa proposal yang disampaikan oleh Israel telah mengabaikan poin-poin krusial yang diinginkan oleh Palestina, yaitu penyatuan negara Palestina di Tepi Barat, kedaulatan penuh Otoritas Palestina atas Jerusalem timur yang merupakan wilayah yang ditinggali oleh populasi Arab, dan resolusi mengenai hak kembalinya para pengungsi Palestina. Bahkan, menurut Pressman, para negosiator Palestina benar-benar menginginkan *two-state solution* dan tidak berkeinginan untuk menghancurkan Idid Israel (Pressman, 2003:6). Namun demikian, versi AS dan Israel (yang menyebut bahwa kegagalan perundingan adalah karena sikap Palestina) lebih banyak tersebar ke publik karena faktanya dalam perundingan ini ada ketidakseimbangan kekuatan antara Israel dan Palestina. Israel dan AS memiliki lebih banyak kekuatan dan pengaruh di meja perundingan dibandingkan Palestina serta unggul dalam menyebarluaskan retorika, citra, dan simbol terkait perundingan ini (Pressman, 2003:7).

Secara umum, warga Palestina juga sudah tidak percaya lagi dengan perjanjian dalam Oslo Accords yang sudah lama diberlakukan karena adanya pelanggaran dari pihak Zionis Israel yang dengan sewenang-wenang melakukan *illegal settlement* sehingga menelan banyak korban. Inilah yang mendorong terjadinya perlawanan Intifada II yang menjatuhkan banyak korban. Sesuai dengan data di bawah ini,

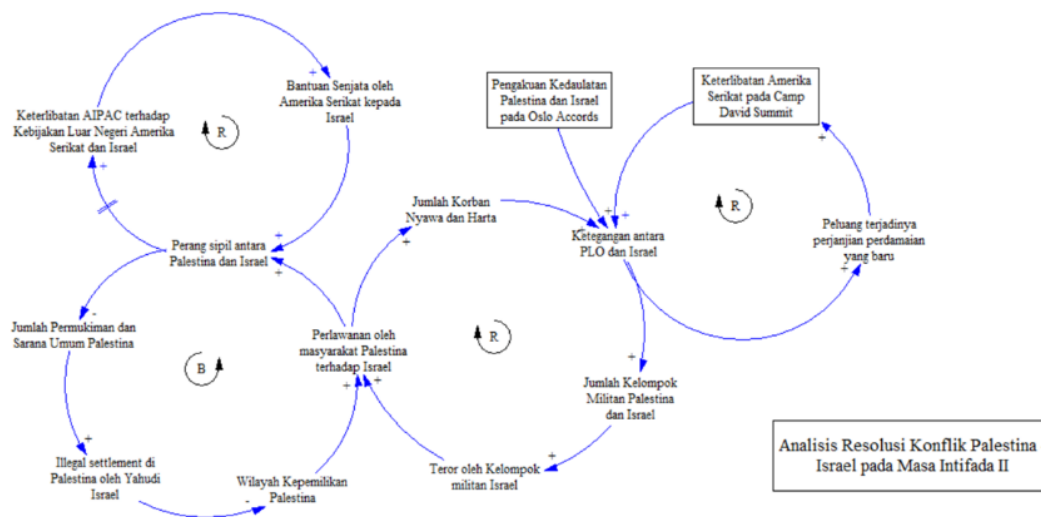
perbandingan masyarakat bukan tentara (*combantant*) dari Palestina dan Israel sangat berbanding jauh. Korban masyarakat sipil Palestina lebih banyak jika dibanding dengan masyarakat sipil Israel dalam rentang waktu Intifada II, yaitu 2000-2005.

**Ringkasan Laporan Statistik Rata-rata Korban Jiwa
periode 27 September 2000 – 1 Januari 2005**

Masyarakat Palestina	Korban	Masyarakat Israel	Korban
Perempuan	140 jiwa	Perempuan	316 jiwa
Masyarakat Sipil yang terbunuh oleh kelompok lawan	1.099 jiwa	Masyarakat Sipil yang terbunuh oleh kelompok lawan	764 jiwa
- Diantaranya adalah perempuan	103 jiwa	- Diantaranya adalah perempuan	306 jiwa
Tentara yang terbunuh oleh kelompok lawan	1.542 jiwa	Tentara yang terbunuh oleh kelompok lawan	216 jiwa
Masyarakat yang terbunuh akibat aksi internal	406 jiwa	Masyarakat yang terbunuh akibat aksi internal	22 jiwa
Masyarakat Sipil < 12 tahun	88 jiwa	Masyarakat Sipil < 12 tahun	46 jiwa
Masyarakat Sipil (laki-laki) usia 12-29 tahun	581 jiwa	Masyarakat Sipil (laki-laki) usia 12-29 tahun	178 jiwa
Masyarakat Sipil ≥ 45 tahun	89 jiwa	Masyarakat Sipil ≥ 45 tahun	255 jiwa

Sumber: Wayback Machine

Berdasarkan paparan di atas, penulis mencoba menghubungkan berbagai variabel penting dan tindakan aktor-aktor utama yang terlibat dalam berlanjutnya konflik antar dua negara Palestina-Israel dalam diagram causal loop (CLD) berikut ini.



Gambar 1 CLD Analisis Resolusi Konflik Palestina-Israel Pada Masa Intifada II

Diagram *causal loop* ini menggambarkan adanya hubungan sebab-akibat dalam sebuah sistem yang dapat mengescalasi konflik. Dalam menganalisis, penulis menggunakan perspektif Konstruktivisme dan Pendekatan Gradualisme sehingga penulis dapat menemukan bahwa praktik politik yang dilakukan oleh AS terhadap konflik antara Palestina dan Israel berperan dalam melanggengkan konflik antar kedua negara tersebut pada masa sebelum dan sesudah terjadinya Intifada II.

Penulis menemukan bahwa **pengakuan kedaulatan dari Palestina kepada Israel (dan sebaliknya, pengakuan PLO sebagai Otoritas Palestina) pada Oslo Accords** justru pada akhirnya meningkatkan **ketegangan antara PLO dan Israel** karena Oslo menuntut PLO untuk menjaga keamanan Israel (melarang warga Palestina untuk melakukan perlawanan) padahal di saat yang sama, Israel tidak memenuhi kewajibannya dalam Kesepakatan Oslo. Meningkatnya **ketegangan antara PLO dan Israel** menyebabkan 2 variabel baru yakni: meningkatnya **peluang terjadinya perjanjian perdamaian yang baru** dan meningkatnya **jumlah kelompok militan Palestina dan Israel**.

Ketika muncul **peluang terjadinya perdamaian yang baru**, muncul pula variabel **keterlibatan Amerika Serikat pada Camp David Summit**. Meningkatnya **keterlibatan Amerika Serikat pada Camp David Summit** mengakibatkan **ketegangan antara PLO dan Israel** meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan analisis penulis yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu bahwa kehadiran pihak eksternal dalam melakukan perjanjian perdamaian ternyata sama sekali tidak membuahkan hasil dan justru mengonstruksi ketegangan politik baru sehingga mengakibatkan sikap represif aktor-aktor terlibat yang tentunya menggiring sentimen publik Palestina untuk melakukan perlawanan.

Variabel **ketegangan antara PLO dan Israel**, membentuk *reinforcing loop* antarketiga variabel tersebut. Dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Amerika Serikat terhadap perdamaian atas konflik Palestina-Israel melanggengkan konflik antar kedua negara karena variabel yang disebutkan di atas saling menguatkan.

Selanjutnya variabel **ketegangan antara PLO dan Israel** mengakibatkan **jumlah kelompok militan Palestina dan Israel** meningkat. Ketika **jumlah kelompok militan Palestina dan Israel** meningkat, mengakibatkan kasus **teror oleh kelompok militan Israel** meningkat. Meningkatnya **teror oleh kelompok militan Israel** mengakibatkan **perlawanan oleh masyarakat Palestina terhadap Israel** meningkat. Perlawanan tersebut dilakukan oleh masyarakat sipil maupun kelompok militan yang sudah terbentuk sejak lama yang berasal dari masyarakat Palestina. Kejadian tersebut semakin hari semakin memanas hingga peristiwa Intifada II mencuat.

Kemudian, **perlawanan masyarakat Palestina terhadap Israel** meningkat, mengakibatkan dua masalah baru yakni: **jumlah korban nyawa dan harta** dan **perang sipil antara Palestina dan Israel**. Dalam masalah pertama, ketika **perlawanan oleh masyarakat Palestina terhadap Israel** meningkat, **jumlah korban nyawa dan harta** turut meningkat. Meningkatnya **jumlah korban nyawa dan harta**, mengakibatkan **ketegangan antara PLO dan Israel** meningkat. Dari penjelasan mengenai percabangan masalah kedua yang disebabkan oleh **ketegangan antara PLO dan Israel**, membentuk *reinforcing loop* antar kelima variabel tersebut. Dapat disimpulkan bahwa **ketegangan yang terjadi antara PLO dan Israel** mengakibatkan 4 masalah baru yang dapat memperuncing konflik karena variabel yang disebutkan di atas saling menguatkan.

Percabangan masalah kedua dari **perlawanan oleh masyarakat Palestina terhadap Israel** meningkat, menyebabkan **perang sipil antara Palestina dan Israel** meningkat. **Perang sipil antara Palestina dan Israel** ini terjadi di beberapa titik di wilayah Palestina. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya **jumlah permukiman dan sarana umum Palestina** (rusak akibat penghancuran/demolition yang dilakukan Israel). Karena **jumlah permukiman dan sarana umum Palestina** berkurang, **illegal settlement di Palestina** meningkat, karena di bekas tanah gedung permukiman tersebut dibangun perumahan-perumahan khusus Yahudi-Israel.

Semakin tinggi **illegal settlement di Palestina oleh Yahudi Israel** berbanding terbalik dengan **wilayah kepemilikan Palestina** yang semakin hari semakin menyempit. **Wilayah kepemilikan Palestina** yang semakin berkurang membuat masyarakat Palestina merasa bahwa mereka teralienasi sehingga **perlawanan oleh masyarakat Palestina terhadap Israel** meningkat. Dari penjelasan mengenai percabangan masalah

kedua yang disebabkan oleh **perlawanan oleh masyarakat Palestina terhadap Israel**, membentuk *balancing loop* antar kelima variabel tersebut.

Perang sipil antara Palestina dan Israel (antara warga sipil Palestina atau milisi, melawan tentara Israel) akan terus terjadi karena wujud provokasi yang dilakukan AS melalui **bantuan senjata oleh AS terhadap Israel** semakin meningkat. Meningkatnya **bantuan senjata oleh AS** disebabkan oleh **keterlibatan AIPAC terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dan Israel**. Kebijakan tersebut akan ditentukan oleh seberapa sering **perang sipil antara Palestina dan Israel** terjadi. Semakin banyak **perang sipil antara Palestina dan Israel**, semakin tinggi pula **keterlibatan AIPAC terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dan Israel**. Salah satu wujud kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap negara Israel adalah berupa **bantuan senjata oleh Amerika Serikat terhadap Israel**. Dari penjelasan mengenai **Perang sipil antara Palestina dan Israel**, membentuk *reinforcing loop* ketiga variabel yang dijelaskan di atas karena variabel tersebut saling menguatkan.

Simpanan

Konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel merupakan konflik yang kompleks akan kepentingan. Kepentingan tersebut tidak hanya sekadar kepentingan internal kedua belah pihak –yaitu kehendak bangsa Palestina untuk merdeka dan melawan pendudukan; dan kehendak Israel untuk mempertahankan pendudukannya di Palestina—tetapi juga terkait dengan pihak eksternal. Perspektif Konstruktivisme dan konsep strategi politik yang digunakan oleh penulis dapat memperjelas bahwa keterlibatan Amerika Serikat yang bertindak menjadi mediator antara Palestina dan Israel, namun yang terjadi adalah AS melakukan bentuk strategi Gradualisme lewat manipulasi konflik sehingga konflik menjadi berkepanjangan.

Di samping itu, perilaku dari kedua pihak (perlawanan dari pihak Palestina dan represi serta pendudukan dari pihak Israel) yang dipimpin oleh para tokoh politik, yaitu Yaser Arafat dari Otoritas Palestina, dan PM Israel pasca Yitzak Rabin, terutama PM Ariel Sharon yang mengambil kebijakan sangat represif seiring dengan kebijakan AS melakukan Perang Melawan Terorisme pasca 911 tahun 2001, memunculkan perlawanan. Perlawanan memunculkan respon dan akhirnya konflik terus berlanjut hingga kini. Hubungan sebab-akibat yang saling interkoneksi dan kompleks tersebut dapat divisualisasikan dengan menggunakan CLD. Berdasarkan CLD yang penulis konstruksikan, dapat disimpulkan bahwa “bahan bakar” dari memutarnya siklus maupun dinamika konflik Palestina dan Israel salah satunya karena dominasi Amerika Serikat di Timur Tengah dan dukungannya pada Israel.

Daftar Pustaka

- Anwar, I.C. (2021). Apa Itu Intifada I dan II dalam Sejarah Konflik Palestina & Israel?. *Tirto*, [online]. Dalam: <https://tirto.id/gf8J> [Diakses pada tanggal 19 Juni 2021]
- Ben Gurion, D. (nd) *Theodore Herzl Biography*. [daring] Britannica. Dalam: <https://www.britannica.com/biography/Theodor-Herzl> [Diakses pada tanggal 4 September 2021]
- B'Tselem Report. (1999). *Oslo: before and after: The Status of Human Rights in the Occupied Territories*. Dalam: http://www.btselem.org/publications/summaries/199905_oslo_before_and_after. [Diakses pada tanggal 19 Juni 2022].
- Goldenberg, S. (2001). Heat Turned Up on Arafat. *The Guardian*, [online]. Dalam: <https://www.theguardian.com/world/2001/dec/04/israel5> [Diakses pada tanggal 19 Juni 2022]
- Lear, E.N., & Laqueur, W.Z. (1974). A History of Zionism. *Contemporary Sociology*, Vol 3, p. 440.
- Pressman, J. (2003). Visions in Collision: What Happened at Camp David and Taba?. *International Security*. 28. 5-43. 10.1162/016228803322761955.
- Sarasi, V., Yulianti, D., Farras, J.I. (2021). *Pengantar Berpikir Sistem dan Dinamika Sistem*. Bengkulu: Penerbit Yayasan Sahabat Alam Raflesia.
- Satrianingsih, A., & Abidin, Z. (2016). Sejarah Zionisme dan Berdirinya Negara Israel. *Jurnal Adabiyah*, 16(2), 172-184. <https://doi.org/10.24252/JAd.v17i116i2a7>
- Sharif, B. A. (2009). *Arafat and the Dream of Palestine*. New York: Palgrave MacMillan.
- Weiss J dan Rosenberg S. (2003). *Sequencing Strategies and Tactics*. (daring) Dalam: <https://www.beyondintractability.org/essay/issue-segmentation> [Diakses pada tanggal 5 September 2021]
- Wibowo H. (2014). Mandat Liga Bangsa-Bangsa: Kegagalan Palestina Menjadi Negara Merdeka (1920-1948). *Al-Turās*. Vol 20 no. 2. 297-311.